



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 yang belum terselesaikan untuk dimasukkan kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 14 TAHUN 2020 PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021.

Diktum I

Mengubah Lampiran dalam Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini;

Diktum II

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 November 2021

WAKIL KETUA DPRD,


MUH. SIDDIQ BM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021**



NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BAR U	UBAH		NA	Penjelas an atau keterangan gan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Pemilihan Kepala Desa	Pengaturan mengenai pemilihan kepala desa secara serentak dan antar waktu	√	-	Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017	√	-	1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. Disdukcapil 4. BKPSDM 5. Satuan Pol-PP & Damkar 6. Kesbangpol	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
2	Peraturan Daerah	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019	-	√	-	-	√	-	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Puskesmas	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Kesehatan

3	Peraturan Daerah	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mami Kabupaten Luwu Timur	Pengaturan mengenai bentuk Badan Hukum PDAM Kab. Luwu Timur	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	√	-	1. DPKD 2. Bapelitbangda 3. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
4	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Luwu Timur TA. 2020	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	√	-	SEMUA SKPD	Triwulan I	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
5	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	√	-	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√	-	SEMUA SKPD	Triwulan II	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
6	Peraturan Daerah	Perangkat Desa	Pengaturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	√	-	Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	√	-	1. Sekretariat Daerah 2. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan II	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
7	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perubahan Struktur dan besarnya tarif retribusi yang akan ditetapkan	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan 3. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan II	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

8	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Perubahan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	1. BPKD 2. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan II	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
9	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031	Perubahan acuan Normatif disesuaikan dengan Perundang-Undangan terbaru, perubahan peruntukan ruang dan penegasan pengaturan ruang secara menyeluruh baik ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam bumi	-	√	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota	-	√	1. DPKPP 2. Dinas PU & PR 3. DPM & PTSP 4. DLH 5. Satuan Pol-PP & Damkar 6. DPRD	Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
10	Peraturan Daerah	Badan Permusyawaratan Desa	Pengaturan mengenai Tupoksi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa	√	-	Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa	-	√	1. Sekretariat Daerah 2. Disdukcapil 3. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
11	Peraturan Daerah	Kepemudaan	Pengaturan mengenai Kepemudaan di Daerah	√	-	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	√	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kemepudaan dan Olahraga	Triwulan III	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur
12	Peraturan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah		√	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah				Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
13	Peraturan Daerah	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Luwu Timur		√	-					Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pertanian

14	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√					Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Perhubungan	
15	Peraturan Daerah	Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona	-	√	-	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	√		1. DPRD 2. Disdukcapil 3. Satuan Pol-PP & Damkar 4. Camat Angkona 5. Camat Kalaena	Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Luwu Timur
16	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur TA.2021	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	-	-	Semua SKPD	Triwulan III	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
17	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	-	-	Semua SKPD	Triwulan IV	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
18	Peraturan Daerah	Naskah Hari Jadi Luwu Timur	-				√	-		Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur
19	Peraturan Daerah	Etika Pemerintahan	-				√	-		Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur

20	Peraturan Daerah	Kepariwisataan	-				√	-		Lanjutan	Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur
21	Peraturan Daerah	Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan	1. Banyaknya Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak 2. Kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat	√	-	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	√	-	1. DISDIK 2. DINKES 3. DPMD 4. DP2KB 5. DISDUKCAPIL 6. Pol-PP & Damkar	Lanjutan	Perangkat Daerah Permrakarsa : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos & P3A)
22	Peraturan Daerah	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya	√	-		√			Lanjutan	Perangkat Daerah Permrakarsa : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga


 WAKIL KETUA DPRD,

 MUH. SIDDIQ BM